



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SINGARAJA

LAPORAN KINERJA KPKNL SINGARAJA TAHUN 2021

PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singaraja pada Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Singaraja berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN sebagai unit eselon I, KPKNL Singaraja telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja instansi vertikal DJKN. *Performance* KPKNL Singaraja dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Singaraja dengan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2021. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam LAKIN 2021 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) KPKNL Singaraja merupakan kesepakatan seluruh jajaran subbagian maupun seksi-seksi pada KPKNL Singaraja berdasarkan Peta Strategis dan IKU Kemenkeu Three KPKNL.

Kami harapkan penyusunan LAKIN Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singaraja. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan dilandasi oleh nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, dan motto KPKNL Singaraja yaitu SAKTI (Senyum, Adil, Kompeten, Tertib, dan Inovatif) tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singaraja yang telah mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat -Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Singaraja



Saiful Hadi
NIP 196705281992031003

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
2. Peran Strategis KPKNL	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
1. Rencana Strategis	6
2. Penetapan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
1. Capaian Kinerja Organisasi	28
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
3. Realisasi Anggaran....	39
BAB IV PENUTUP	41
1. Kesimpulan.....	41
2. Langkah/Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja	41
LAMPIRAN	43
Lampiran I. Capaian Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2021	
Lampiran II. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Dua Tahun Sebelumnya	

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singaraja mengacu pada visi DJKN yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi KPKNL Singaraja, yaitu: (1) mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singaraja adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2021.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

KPKNL Singaraja selama tahun 2021 berhasil merealisasikan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi atau sama dengan target (hijau), dan 1 (satu) IKU yang merah. Rincian realisasi Indikator Kinerja Utama KPKNL Singaraja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	92,28%	148,84%	Diatas target
		1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	115,02%	115,02%	Diatas target
		1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017)	100%	77%	77%	Dibawah target
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88 (skala 100)	95.69	108,74%	Diatas target
		2b-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	181,11%	181,11%	Diatas target
3.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,68 (skala 5)	4,68	100%	Diatas target
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	101,44%	101,44%	Diatas target

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Penilaian yang Efektif	4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	125,93%	125,93%	Diatas target
		4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0,40%	198,18%	Diatas target
5.	Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif	5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	122,22%	122,22%	Diatas target
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35%	54,46%	155,61%	Diatas Target
		5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%	Diatas target
		5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,50%	0%	200%	Diatas target
6.	Edukasi yang efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90 (skala 100)	94,79	105,32%	Diatas target
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	94,59%	111,29%	Diatas target
8	SDM yang kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	116,47%	116,47%	Diatas target
9	Organisasi yang fit for purpose	9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	94,26	125,68%	Diatas target

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9b- Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	94,78	118,47%	Diatas target
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,70%	100,21%	Diatas target

Dengan demikian maka NKO KPKNL Singaraja tahun 2021 yaitu 109,57%

C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi agar kinerja berjalan optimal. Berikut ini adalah strategi yang diambil oleh KPKNL Singaraja untuk menghadapi kendala yang ada.

Seksi/bagian	No	Permasalahan	Langkah-langkah antisipatif
Umum	1.	Rendahnya pemahaman pegawai terkait pentingnya pengajuan diklat secara mandiri yang berpengaruh terhadap capaian IKU Pengembangan kompetensi pegawai	Melakukan pendampingan kepada para pegawai yang dalam data tracking belum memenuhi target JP
	2.	Terbatasnya jenis diklat maupun e-learning yang sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai	Membuat Nota Dinas terkait himbuan mengikuti e-learning Open Access ataupun pengajuan diklat
	3.	Adanya target realisasi capaian output yang menantang pada tiap triwulan, mengingat bobot pada indicator ini cukup besar	Melakukan Koordinasi dengan masing-masing seksi maupun dengan Kepala Kantor terkait rencana realisasi anggaran, khususnya yang masih kecil dalam penyerapan

PKN	1.	Dari jumlah 292 NUP Target Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022 pihak kantor pusat meminta untuk melakukan verifikasi data dan diperoleh data BMN yang valid sebanyak 272 NUP. Atas hasil verifikasi ini telah disampaikan oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara kepada Direktorat BMN, namun belum ada tanggapan lebih lanjut mengenai kejelasan target SBSK 2022	Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022 pada satker LP Khusus Anak Kelas II Karangasem, Rutan Bangli, LP Kelas IIB Karangasem, LP Narkotika Kelas IIA Bangli, Bapas Karangasem, Kantor Kemenag Karangasem, Kantor Kemenag Bangli, dan BPIU2K Karangasem
	2.	Potensi PNPB dari Pengelolaan BMN di wilayah kerja KPKNL Singaraja yang relatif kecil yang biasanya diperoleh dari sewa atm, sewa kantin, dan penjualan BMN kendaraan dan inventaris yang telah rusak berat	Menghimbau satker untuk menginventarisasi BMN yang berpotensi untuk dilakukan pemanfaatan BMN
	3.	Satker target sertifikasi seluruhnya telah menyampaikan permohonan bidang tanah yang akan disertifikatkan ke kantor pertanahan	Tetap berkoordinasi dengan kantor pertanahan, satker target sertifikasi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan KPKNL Denpasar selaku KPKNL Induk untuk penyelesaian sisa target sertifikasi tahun 2022
	4.	Data Statistik yang diperoleh dari BPS di wilayah kerja KPKNL Singaraja yang dipakai untuk mengukur indikator Manfaat Sosial masih tahun 2020, sehingga perlu koordinasi ulang dengan BPS untuk mendapatkan data statistik terbaru	Melakukan survei pendataan evaluasi kinerja BMN pada satker LP Karangasem, LP Khusus Anak Karangasem dan Undiksha

PENILAIAN	1	Baik seksi Pelayanan Penilaian maupun Seksi PKN memiliki dasar aturan dan pertimbangan masing-masing	Melaksanakan penilaian sesuai SOP secara konsisten
PN	1.	Kurang optimalnya capaian PNBPN	Melakukan penagihan melalui surat dan ke lapangan
LELANG	1.	Pelaksanaan lelang eksekusi khususnya dari lelang UUHT masih banyak yang merupakan lelang pertama dengan limit mendekati atau sama dengan harga pasar sehingga belum menarik minat pembeli lelang	Penggalan Potensi UUHT
HI	1.	Deviasi terjadi karena adanya perbedaan cut-off di akhir periode antara SIMPONI dan OMSPAN	Melakukan rekonsiliasi setiap akhir periode bulan pelaporan
KI	1.	Pengetahuan SDM terhadap pengelolaan kinerja tidak maksimal karena sebagian besar belum pernah mengikuti diklat	Edukasi pengelolaan kinerja

Masalah-masalah yang sering dihadapi diharapkan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan lebih baik dan diupayakan agar kinerja KPKNL Singaraja akan semakin meningkat dengan pencapaian yang optimal serta mampu berjalan dengan lebih baik, yang nantinya diharapkan semakin bisa mengatasi hambatan yang ada, agar pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada KPKNL Singaraja dapat berjalan lancar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Singaraja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

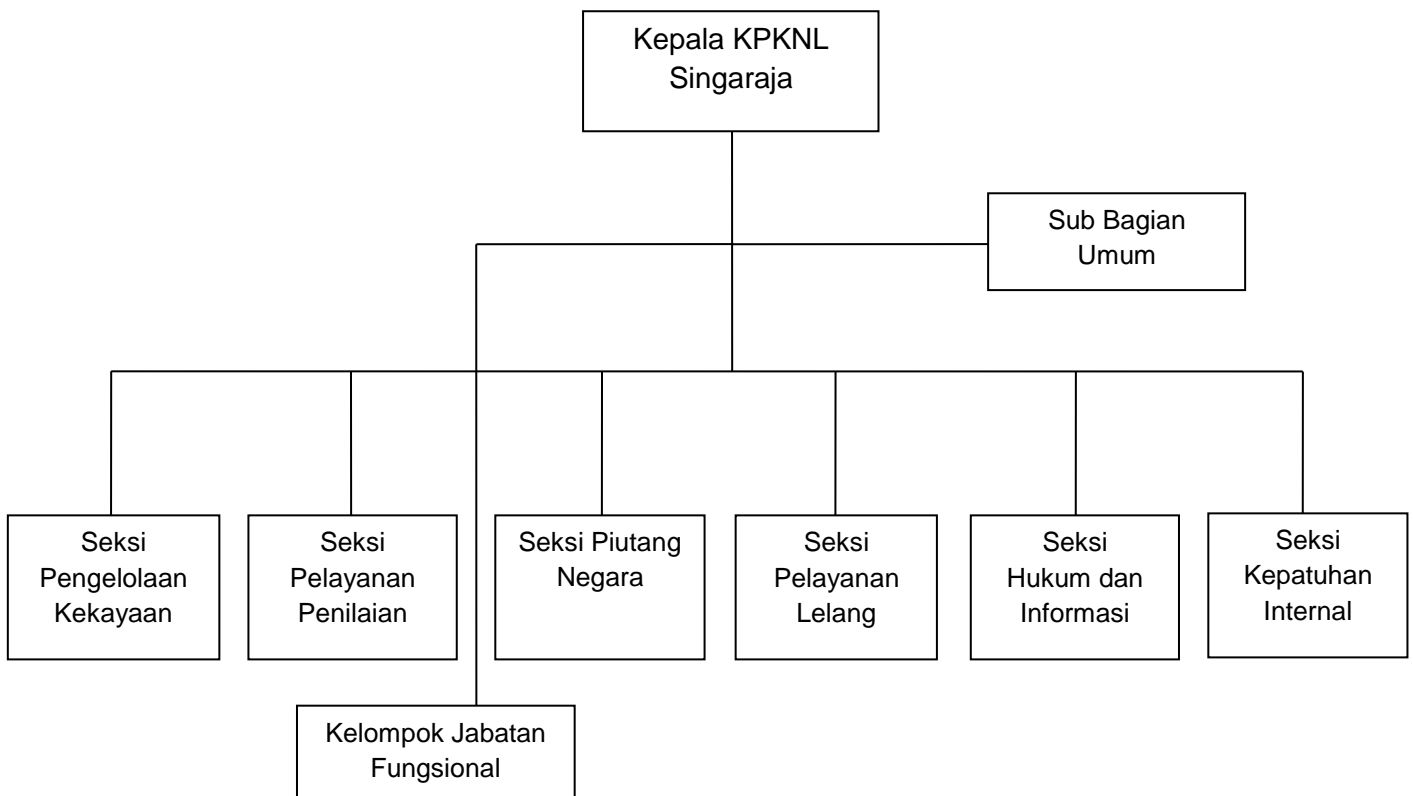
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Singaraja memiliki satu subbagian, enam seksi dan kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi KPKNL Singaraja terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum
3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Seksi Pelayanan Penilaian
5. Seksi Piutang Negara
6. Seksi Pelayanan Lelang
7. Seksi Hukum dan Informasi
8. Seksi Kepatuhan Internal
9. Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Singaraja didukung oleh 35 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan umur adalah sebagai berikut :



KOMPOSISI PEGAWAI
Per-31 Desember 2021

A. Berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA	-	1	3	-	4
D1	-	1	-	-	1
D3	-	6	5	-	11
D4/S1	-	-	16	-	16
S2	-	-	-	3	3
JUMLAH	-	8	26	1	35

B. Berdasarkan kelompok jabatan fungsional

JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
PENILAI	3
PEJABAT LELANG	3

B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

KPKNL memiliki peran strategis yaitu sebagai ujung tombak dalam hal penilaian kekayaan negara, inventarisasi barang milik negara/daerah, pengelolaan Barang Milik Negara, pengamanan kekayaan negara yang berupa piutang macet yang ada pada debitur dan dalam menggalakkan pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan pemasukan negara dan mempercepat laju perekonomian di tanah air dan KPKNL berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang agar dapat mencapai target yang ditetapkan maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan yaitu visi DJKN yang diharapkan dapat menjadi penggerak pada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun visi DJKN yaitu : ” **Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”. Selanjutnya visi DJKN dijabarkan dalam bentuk misi. Untuk mewujudkan misi tersebut, dituangkan lagi dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang nyata dirumuskan secara jelas. Adapun misi KPKNL Singaraja yang juga merupakan misi DJKN sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk menghadapi dan mengantisipasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau dunia yang bergerak cepat serta kompetitif sebagai dampak globalisasi perekonomian dunia terutama akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka diperlukan peningkatan profesionalisme dan etos kerja, pembinaan karier pegawai yang sistematis dan berkesinambungan, kualitas pelayanan yang dapat memuaskan *stakeholder*, serta akuntabilitas publik dan aparatur yang bersih (bebas dari unsur KKN). Hal ini akan menjadikan DJKN sebagai lembaga yang dibanggakan masyarakat sehingga dapat tetap eksis dan mampu memberikan andil yang nyata dalam pembangunan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas penggunaan dana APBN. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dimaksud, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja.

Dalam pelaksanaan tugas KPKNL Singaraja terus berupaya untuk profesional dan selalu berpegang pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sehingga hasil yang dicapai dalam hal pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara dan lelang dapat optimal dan memuaskan. Selain itu hasil berupa utilisasi kekayaan negara, biaya administrasi dan bea lelang yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat lebih optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1 Visi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja sepakat untuk menjalankan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu: ” **Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

A.2 Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Singaraja menetapkan misi yang sama dengan DJKN, yang terdiri dari :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.3 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya program tersebut berupa terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

A.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Tahun 2021 KPKNL Singaraja menetapkan dua belas sasaran strategis yang akan dicapai :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif;
6. Edukasi yang efektif;
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang fit for purpose;
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

A.5 Kebijakan

Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, keuangan, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Dengan kebijakan ini diharapkan terdapat kelancaran dan keterpaduan langkah dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi DJKN.

A.6 Program

Program/kegiatan KPKNL Singaraja sebagaimana tertuang dalam rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah "Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" .

B. PENETAPAN KINERJA

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan	Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan	62%	92,28%

	SBSK	dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.		
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	<p>Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.</p> <p>Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara</p> <p>Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:</p> <p>1). PNBPN BMN</p> <p>Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:</p> <p>a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)</p> <p>b. pemanfaatan barang milik negara; dan</p> <p>c. pemindahtanganan barang milik</p>	100%	115,02%

		<p>negara.</p> <p>yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.</p> <p>Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.</p> <p>Target PNBPN BMN Tahun 2021 yaitu Rp2.700.000.000,00</p>		
1c-N	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDP s.d 2017)	<p>IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.</p> <p>Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angsuran 2. Pelunasan 3. Penarikan/ Pengembalian 4. Pelunasan 5. PSBDT 6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021. 	100%	77%

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
2a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	<p>Tepat waktu bisa diartikan sebagai ketersediaan informasi kepada pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan perusahaan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai laporan</p> <p>Ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang dibagi menjadi 14 layanan, meliputi:</p> <p>1.Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL</p> <p>a) Jumlah Objek 1-50 b) Jumlah Objek 51-100 c) Jumlah Objek >100</p> <p>2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL</p> <p>3.Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL</p> <p>4. Penetapan Jadwal Lelang</p>	88	95.69

		<p>5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang</p> <p>6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang</p> <p>7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang</p> <p>8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)</p> <p>9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)</p> <p>10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL</p> <p>11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara</p> <p>12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan</p> <p>13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas</p> <p>14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai</p>		
2b-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan	100%	181,11%

		<p>penawaran harga secara inklusif.</p> <p>Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.	4,68	4,68

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban	100%	101,44%

		<p>masing-masing pihak sebagai berikut:</p> <p>A. Kendali BPN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan. <p>B. Kendali K/L</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat. <p>C. Kendali Kemenkeu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpan asli sertipikat; 2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi. 		
4b-CP	Persentase implementasi	Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara	100%	125,93%

	<p>si evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)</p>	<p>sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.</p> <p>Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).</p>		
4c-CP	<p>Deviasi ketergunaan hasil penilaian</p>	<p>Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.</p> <p>Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).</p> <p>Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.</p> <p>Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.</p> <p>Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan</p>	<p>22%</p>	<p>0,40%</p>

		<p>kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama</p> <p>Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

5. Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
5a-CP	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	<p>IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.</p> <p>Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:</p> <p>1. BKPN Lunas</p>	100%	122,22%

		<p>2. BKPN Penarikan</p> <p>3. BKPN dikembalikan, dan</p> <p>4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).</p>		
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.	35%	54,46%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	<p>E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).</p> <p>Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.</p> <p>Implementasi e-auction meliputi:</p> <p>1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.</p> <p>2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)</p>	92%	100%

5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	<p>PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).</p> <p>Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:</p> <p>1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi</p> <p>2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.</p> <p>Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.</p> <p>Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%</p> <p>Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%</p>	12,50%	0%
-------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----

6. Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap	90	94,79

		<p>semester satu kali).</p> <p>Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,</p> <p>2) kualitas materi (bobot 15%),</p> <p>3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan</p> <p>4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang;
- b. temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti;
- c. tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN; dan
- d. surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

No	Indikator Kinerja	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
----	-------------------	----------	-------------	----------------

	Utama			
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.	85%	94,59%

8. SDM yang kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	<p>mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.</p> <p>Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan</p> <p>Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24</p>	100%	116,47%

	<p>jam pelatihan (JP).</p> <p>1 jamlat adalah 45 menit</p> <p>Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.</p> <p>Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.</p> <p>Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya</p> <p>Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.</p> <p>Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawahan yang akan pensiun di tahun 2021; - bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya <p>-- pegawai pada unit non-eselon</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

9. Organisasi yang fit for purpose

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	<p>Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.</p> <p>Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.</p>	76	94,26

		<p>Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.</p>		
9b-N	<p>Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator</p>	<p>Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.</p> <p>Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).</p> <p>Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.</p>	80	94,78

10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

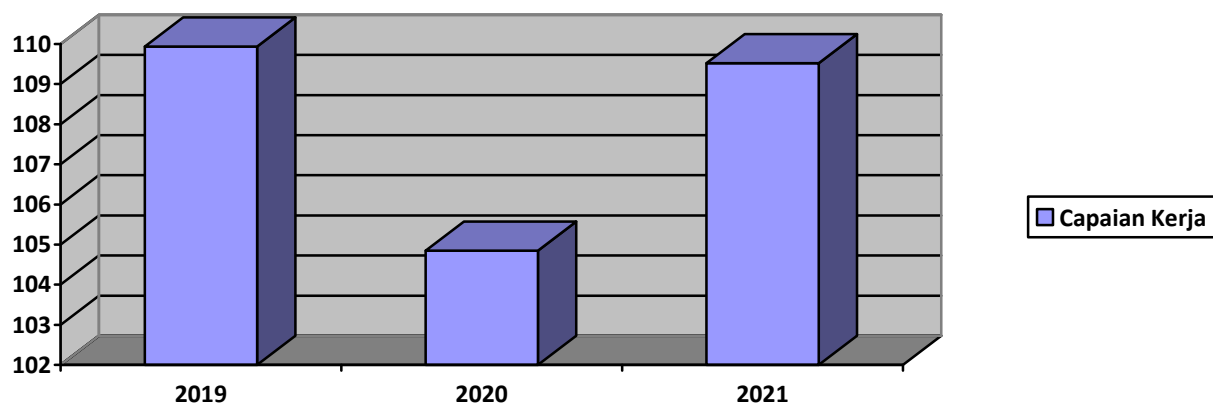
No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2021	Realisasi 2021
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	<p>Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.</p> <p>Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan</p>	95,5%	95,70%

		Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Untuk menerjemahkan strategi kedalam suatu tindakan, Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi KPKNL tahun 2021 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 sasaran strategis (SS) dan 19 indikator kinerja utama (IKU).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi



KPKNL Singaraja menyusun Capaian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing komponen IKU. KPKNL Singaraja sebagian besar dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2021 pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singaraja sebesar 109,52%. Nilai tersebut meningkat dibandingkan NKO pada tahun 2020 yaitu 104,85% tetapi belum dapat mengungguli capaian NKO pada tahun 2019 yaitu 109,94%. Adapun Data Realisasi dan Capaian tahun 2021 telah tersampaikan dalam tabel dibawah ini.

Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal								
1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target		50%	50%	55%	55%	62%	62%	
Realisasi		86,33%	86,33%	91,93%	91,93%	92,28%	92,28%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal								

1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	16,57%	58,33%	58,33%	80,53%	80,53%	115%	115%	
Capaian	117,76%	70,88%	70,88%	120%	120%	115%	115%	
Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal								
1c-N Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	29,52%	58,29%	58,29%	58,29%	58,29%	77%	77%	
Capaian	118,08%	116,58%	116,58%	77,72%	77,72%	77%	77%	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	88	88	88	88	88	88	88	
Realisasi	100	92,24	92,24	94,61	94,61	95,69	95,69	
Capaian	113,64%	104,82%	104,82%	107,51%	107,51%	108,74%	108,74%	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2b-CP Persentase realisasi Pokok Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	29,57%	94,61%	94,61%	129,31%	129,31%	181,11%	181%	

Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								
3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target						4,68	4,68	
Realisasi						4,68	4,68	
Capaian						100%	100%	
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		20%	20%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi		25,18%	25,18%	37,41%	37,41%	101,44%	101,44%	
Capaian		120%	120%	62,35%	62,35%	101,44%	101,44%	
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
4b-CP Persentase Implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	37,04%	62,96%	62,96%	125,93%	125,93%	125,93%	125,93%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P

Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0,4%	0,4%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	71,11%	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	122,22%	122,22%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
5b-CP Persentase Produktivitas Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	
Realisasi	46,48%	50,78%	50,78%	50,51%	50,51%	54,46%	54,46%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								

5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Edukasi yang efektif								
6a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		90	90			90	87	
Realisasi		94,50	94,50			94,79	94,79	
Capaian		105%	105%			105,32%	105,32%	
Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif								
7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		40%	40%			85%	85%	
Realisasi		86,49%	86,49%			94,59%	94,59%	
Capaian		120%	120%			111,29%	111,29%	
SDM yang Kompeten								
8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	37,50%	70,59%	70,59%	88,24%	88,24%	116,47%	116,47%	

Capaian	37,50%	70,59%	70,59%	88,24%	88,24%	116,47%	116,47%	
Organisasi yang Fit For Purpose								
9a-N Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target						75	75	
Realisasi						94,26	94,26	
Capaian						125,68%	125,68%	
Organisasi yang Fit For Purpose								
9b-N Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	95	95,3	95,3	94,9	94,9	94,78	94,78	
Capaian	118,75%	119,13%	119,13%	109,78%	109,78%	118,47%	118,47%	
Pengelolaan Keuangan Yang Optimal								
10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	
Realisasi	100%	99,5%	99,5%	98,17%	98,17%	95,70%	95,70%	
Capaian	104,71%	104,19	104,19%	102,80%	102,80%	100,21%	100,21%	

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

KPKNL Singaraja memiliki sepuluh (10) sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam Kemenkeu – Three. Sasaran strategis beserta indikator kinerja utama masing masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif;
6. Edukasi yang efektif;
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang *fit-for-purpose*;
10. Pengelolaan keuangan yang optimal.

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah tingkat kesesuaian penggunaan BMN dan SBSK, persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, serta tingkat penurunan outstanding piutang negara. Pada tahun 2021 persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK mencapai 92,28%, Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 115,02%, lalu capaian persentase penurunan outstanding piutang negara adalah 77%. KPKNL Singaraja telah semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut, termasuk melakukan penggalan potensi lelang khususnya dari lelang eksekusi, dan imbauan terus-menerus kepada satker terkait pemanfaatan BMN. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, kemungkinan terjadinya risiko “aset eks BPPN, PPA dan IKM dari Kementerian Perindustrian tidak dapat dioptimalkan” berada di level yang masih sama dengan triwulan sebelumnya karena aset BPPN,PPA dan IKM dari Kementerian Perindustrian tidak didukung dengan barang jaminan dan alamat debitur tidak diketahui. Sebanyak 400 BKPN dengan nilai outstanding sebesar Rp20.225.496.633,35 dan nilai PNBP sebesar Rp2.022.549.663,34. Adapun perencanaan kegiatan tahun 2022 untuk meningkatkan capaian tersebut, meliputi:

- Menyampaikan penagihan melalui surat;
- Melakukan inventarisasi satker yang sudah mendapat persetujuan sewa namun belum ditindaklanjuti menjadi perjanjian sewa lalu dikoordinasikan agar segera ditindaklanjuti;

- Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022 pada satker LP Khusus Anak Kelas II Karangasem, Rutan Bangli, LP Kelas IIB Karangasem, LP Narkotika Kelas IIA Bangli, Bapas Karangasem, Kantor Kemenag Karangasem, Kantor Kemenag Bangli, dan BPIU2K Karangasem;
- Melakukan penagihan langsung/melalui saluran komunikasi lainnya.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang

Indikator Kinerja Utama pertama pada Sasaran Strategis ini adalah indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang. Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 ditargetkan 88 dan tercapai 95,69. Layanan yang diberikan kepada stakeholder selama Q1 sampai Q4 telah dilakukan secara optimal. Dibuktikan dengan capaian layanan pada setiap seksi sudah sangat baik meskipun terdapat kendala pelaksanaan akibat Pandemi Covid-19. Dan untuk tahun 2022 seksi PKN, PN, dan Lelang akan melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin sesuai SOP.

b. Indikator Kinerja Utama selanjutnya adalah persentase realisasi pokok lelang. Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% (Rp 70.000.000.000) dan tercapai sebesar 181,11%. Capaian yang cukup besar ini tidak lepas dari pelaksanaan lelang UUHT, dan koordinasi secara intens dengan pihak pegadaian. Koordinasi ini telah menghasilkan capaian pokok lelang pegadaian melonjak sebesar 357,37%. Kedepannya seksi lelang akan melakukan penggalian potensi lelang eksekusi.

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 4,68 dengan capaian 4,68 sehingga realisasi IKU KPKNL Singaraja tersebut melampaui target yang ditetapkan. Perhitungan ini berdasarkan pada kuesioner yang ditujukan kepada pengguna layanan. Selama tahun 2021 permasalahan yang dialami adalah tuntutan dari stakeholder atas kualitas pelayanan yang makin baik. Pada tahun anggaran 2021 seksi PKN, Penilaian, PN, Lelang, dan HI akan menyiapkan data responden untuk perhitungan IKPL Tahun berjalan.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

a. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Komponen indikator kinerja utama pertama yang akan dibahas persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan. pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 139 bidang adapun realisasi target ini sebesar 140 bidang tanah.

Tahun 2021 seluruh komponen tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Tercapainya seluruh komponen pada IKU tahun 2021 ini tidak terlepas dari intensnya koordinasi dengan kantor pertanahan dan satker target sertifikasi yang dilakukan oleh seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Disamping itu juga melalui koordinasi dengan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta KPKNL Denpasar selaku KPKNL Induk, dilakukan penggalan potensi untuk persiapan sertipikat tahun 2022. Berdasarkan komponen tersebut sehingga capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2021 sebesar 101,44%.

b. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Komponen indikator kinerja utama kedua membahas evaluasi kinerja BMN di Wilayah kerja KPKNL Singaraja pada tahun 2021 ini, memiliki target sebesar 12. Beberapa kegiatan pun dilaksanakan meliputi, koordinasi dengan satuan kerja terkait kegiatan pengukuran evaluasi kinerja BMN tahun. Selanjutnya kegiatan evaluasi kinerja BMN tahun 2021 pada satker di wilayah kerja KPKNL Singaraja sebanyak 34 NUP dengan rincian sebagai berikut: satker Undiksha sebanyak 10 NUP, satker BBRBLPP Gondol 3 NUP, satker SPN Polda Bali sebanyak 4 NUP, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana sebanyak 7 NUP, Polres Jemberana sebanyak 4 NUP, Balai Riset dan Observasi Laut sebanyak 4 NUP, dan PPN Pengembangan sebanyak 2 NUP. Dengan kedua kegiatan diatas capaian IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN sebanyak 125,93%.

c. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Indikator kinerja utama terakhir dari sasaran strategis ini adalah deviasi ketergunaan hasil penilaian. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan untuk IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian maksimal sebesar 22% dan pada akhir Triwulan IV realisasi sebesar 0,4%. Realisasi tersebut diakibatkan dari nilai persetujuan ditetapkan lebih tinggi dari hasil penilaian. Akhirnya, capaian kinerja KPKNL Singaraja untuk IKU ini yaitu 194,48%.

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Komponen dalam IKU persentase efektivitas penyelesaian BKNP membahas realisasi BKNP yang dapat diselesaikan Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 90 Berkas dan realisasi target sebesar 110 Berkas. Tercapainya target IKU ini tidak lepas dari intensitas penelitian lapangan terkait BKNP serta optimalisasi pengurusan piutang negara dan penyelesaian BKNP. Dari usaha-usaha berikut, capaian KPKNL Singaraja pada komponen IKU ini mencapai 122,2%.

b. Persentase Produktivitas Lelang

Pada tahun 2021 KPKNL Singaraja memiliki target Persentase produktivitas lelang sebanyak 35% dengan terealisasi sebanyak 54,46%. Selama tahun berjalan KPKNL Singaraja secara berkelanjutan melakukan penggalan potensi lelang terhadap pelaksanaan lelang UUHT pada PT. BRI, BPD Bali, dan PT. Bank Mandiri. Hal ini membuat Capaian targetnya sebanyak 155,61%.

c. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Pada tahun 2021 KPKNL Singaraja memiliki target Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction sebanyak 92% dengan terealisasi sebanyak 100%. Di tahun berjalan KPKNL Singaraja secara terus menerus mengingatkan pemohon lelang tentang keunggulan pelaksanaan lelang e-auction. Mengakibatkan capaian targetnya sebanyak 111,11%.

d. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Capaian IKU Deviasi data PNBPN KPKNL Singaraja pada akhir Triwulan IV sebesar 200%. Nilai tersebut berdasarkan perhitungan dari target persentase maksimal 12,5% dengan realisasi 0%. Pada tahun berjalan KPKNL Singaraja secara berkala melakukan rekonsiliasi internal antara aplikasi SIMPONI dan OMSPAN.

6. Edukasi yang efektif

Indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis ini adalah Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dimana pada tahun 2021 KPKNL Singaraja mendapat target sebesar 90. Dari target tersebut, KPKNL Singaraja telah melakukan beberapa kegiatan edukasi hingga mendapatkan nilai realisasi sebesar 94,79. Hasil ini berkat usaha seluruh komponen organisasi KPKNL Singaraja selama setiap semester melakukan kegiatan pembinaan, sharing session, maupun pendampingan dengan diutamakan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara media online.

7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pada tahun 2021 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 94,59%. Realisasi tersebut merupakan hasil koordinasi dengan satker agar segera menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan sebelum batas waktu berakhir.

Direncanakan untuk pelaksanaan pada tahun 2022 KPKNL Singaraja akan berkoordinasi terkait tindak lanjut persetujuan yang telah diberi.

8. SDM yang kompeten

Pada tahun 2021 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 116,47%. Realisasi tersebut merupakan hasil koordinasi dengan PIC terkait status kepegawaian pegawai. Monitoring dan pendataan terhadap capaian pegawai juga dilaksanakan selama tahun berjalan. Selain itu pembuatan daftar *tracking* pegawai yang telah mencapai target JP maupun yang telah melampaui target diterapkan agar capaian tersebut dapat selalu ter update. Pada tahun 2022 KPKNL Singaraja akan melakukan pendampingan kepada para pegawai yang dalam data *tracking* belum memenuhi target JP.

9. Organisasi yang *fit-for-purpose*

Indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis ini yaitu Nilai hasil review pengelolaan kinerja serta indeks efektivitas penyelenggaraan FGD pejabat administrator.

1. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

Pada tahun 2021 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 75 dengan realisasi sebesar 94,26. IKU Hasil review pengelolaan kinerja selama tahun 2021 menghasilkan nilai capaian sebesar 125,68%. Meskipun terdapat kendala kurangnya pemahaman pegawai terkait pengelolaan kinerja disebabkan sebagian besar belum pernah mengikuti diklat. Tetapi, edukasi, *review*, monitoring, dan evaluasi kinerja terus dilaksanakan yang menghasilkan realisasi diatas target tersebut.

2. Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator

Pada tahun 2021 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 80 dengan realisasi sebesar 94,78. Capaian realisasi pada IKU ini sebesar 118,47%, capaian tersebut tidak lepas dari usaha KPKNL untuk memberikan arahan-arahan serta pelaksanaan FGD yang sesuai. Koordinasi dengan PIC terkait FGD akan dilaksanakan di tahun 2022.

10. Pengelolaan Keuangan Yang Optimal

Indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini adalah Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Target Tahun 2021 ditetapkan sebesar 95,5% dan realisasi sebesar 95,70%. Capaian sebesar 100,21% merupakan hasil monitoring terhadap perubahan nilai yang menjadi indikator perhitungan nilai. Serta, Pembuatan Daftar Manual terkait capaian output masing masing RO pada tiap Seksi juga dilakukan.

C. Realisasi Anggaran 2021

1. TRIWULAN 1

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	100%
Pengelolaan UP	8%
Data Kontrak	0%
Kesalahan SPM	5%
Retur SP2D	5%
Hal III DIPA	0%
Revisi DIPA	5%
Penyelesaian Tagihan	0%
Konfirmasi Capaian Output	0%
Rekon LPJ	5%
Perencanaan Kas	0%
Realisasi	15%
Pagu Minus	5%
Dispensasi SPM	5%
B) Nilai SMART	0%
Total Nilai Akhir IKPA	100%

2. TRIWULAN 2

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	99,5%
Pengelolaan UP	8%
Data Kontrak	0%
Kesalahan SPM	5%
Retur SP2D	5%
Hal III DIPA	4,63%
Revisi DIPA	5%
Penyelesaian Tagihan	0%
Konfirmasi Capaian Output	17%
Rekon LPJ	5%
Perencanaan Kas	0%
Realisasi	15%
Pagu Minus	5%
Dispensasi SPM	5%
B) Nilai SMART	0%
Total Nilai Akhir IKPA	99,50%

3. TRIWULAN 3

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	99,66%
Pengelolaan UP	8%
Data Kontrak	0%
Kesalahan SPM	5%
Retur SP2D	5%
Hal III DIPA	4,81%
Revisi DIPA	5%
Penyelesaian Tagihan	0%
Konfirmasi Capaian Output	16,93%
Rekon LPJ	5%
Perencanaan Kas	0%
Realisasi	15%
Pagu Minus	5%
Dispensasi SPM	5%
B) Nilai SMART	0%
Total Nilai Akhir IKPA	99,66%

4. TRIWULAN 4

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	99,45%
Pengelolaan UP	8%
Data Kontrak	0%
Kesalahan SPM	5%
Retur SP2D	5%
Hal III DIPA	4,83%
Revisi DIPA	5%
Penyelesaian Tagihan	0%
Konfirmasi Capaian Output	16%
Rekon LPJ	5%
Perencanaan Kas	0%
Realisasi	15%
Pagu Minus	5%
Dispensasi SPM	5%
B) Nilai SMART	93,87%
Total Nilai Akhir IKPA	95,70%

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

KPKNL Singaraja sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan kekayaan negara. Selama tahun 2021 berhasil merealisasikan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi atau sama dengan target (hijau), dan 1 (satu) IKU yang merah. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam pencapaian IKU pada tahun 2021 dengan capaian target sesuai yang diharapkan

2. LANGKAH/STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas perlu diantisipasi agar kinerja berjalan optimal. Berikut ini adalah strategi yang diambil oleh KPKNL Singaraja untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 :

No	Seksi	Rencana Kerja	Strategi
1	Umum	1. Pengembangan Kompetensi Pegawai 2. Pengembangan SDM 3. Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Melakukan pendampingan kepada para pegawai yang dalam data tracking belum memenuhi target JP Membuat Nota Dinas terkait himbuan mengikuti e-learning Open Access ataupun pengajuan diklat Melakukan Koordinasi dengan masing-masing seksi maupun dengan Kepala Kantor terkait rencana realisasi anggaran, khususnya yang masih kecil dalam penyerapan
2	Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara	1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2022 pada satker LP Khusus Anak Kelas II Karangasem, Rutan Bangli, LP Kelas IIB Karangasem, LP Narkotika Kelas IIA Bangli, Bapas Karangasem, Kantor Kemenag Karangasem, Kantor Kemenag Bangli, dan BPIU2K Karangasem

		2. Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara	Menghimbau satker untuk menginventarisasi BMN yang berpotensi untuk dilakukan pemanfaatan BMN
		3. Percepatan Sertifikasi	Tetap berkoordinasi dengan kantor pertanahan, satker target sertifikasi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan KPKNL Denpasar selaku KPKNL Induk untuk penyelesaian sisa target sertifikasi tahun 2022
		4. Evaluasi Kinerja BMN	Melakukan survei pendataan evaluasi kinerja BMN pada satker LP Karangasem, LP Khusus Anak Karangasem dan Undiksha
3.	Penilaian	1. Deviasi Penilaian	Melaksanakan penilaian sesuai SOP secara konsisten
4.	lelang	1. Produktivitas Pokok Lelang	Penggalian Potensi UUHT
5.	PN	1. Optimalisasi Capaian PNB	Melakukan penagihan melalui surat dan ke lapangan

Masalah-masalah yang sering dihadapi diharapkan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan lebih baik sehingga kinerja KPKNL Singaraja akan semakin meningkat dan mencapai hasil yang optimal. Selain itu diharapkan juga agar mampu mengatasi kendala dan masalah yang dihadapi ditahun mendatang, sehingga pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada KPKNL Singaraja dapat berjalan baik dan lancar.

LAMPIRAN

Lampiran I. Capaian Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2021

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
PERIODE s.d TRIWULAN IV
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective(25%)								26.42%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal						105.68%		
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	92.28%	19%	40%	148.839%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	115.02%	14%	30%	115.021%	115.02%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	77%	14%	30%	76.902%	76.90%	merah
Customer Perspective(15%)								16.13%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						115.05%		
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	88.00	95.69	11%	44%	108.74%	108.74%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	181.11%	14%	56%	181.11%	120.00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien						100.00%		
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.68	4.68	21%	100%	100.00%	100.00%	hijau
Internal Process Perspective (30%)								33.43%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif						111.96%		
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	101.44%	19%	43%	101.44%	101.44%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	125.93%	11%	25%	125.93%	120.00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.40%	14%	32%	198.18%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						117.17%		
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	122.22%	14%	25%	122.22%	120.00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	54.46%	14%	25%	155.61%	120.00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventi	P/M	92.00%	100.00%	14%	25%	108.70%	108.70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	14%	25%	200.00%	120.00%	hijau
6	Edukasi yang efektif						105.32%		
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90	94.79	14%	100%	105.32%	105.32%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						111.29%		
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	94.59%	14%	100%	111.29%	111.29%	hijau
Learning & Growth Perspective (30%)								33.59%	
8	SDM yang kompeten						116.47%		
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	116.47%	14%	100%	116.47%	116.47%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose						119.23%		
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	94.26	14%	50%	125.68%	120.00%	hijau
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	94.78	14%	50%	118.47%	118.47%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						100.21%		
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	95.70%	14%	100%	100.21%	100.21%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								109.57%	hijau

Mengetahui,

Kepala KPKNL Singaraja



Saiful Hadi
NIP19670528 199203 1 003

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Sekretaris Manajer Kinerja Organisasi



Yuli Widayat
NIP19740714 199503 1 001

Lampiran II. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Dua Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	-	100%	92,28%
		Persentase penerimaan negara dari pengelolaan KN dan lelang (PNBP)	-	80,27%	115,02%
		Persentase penurunan nilai outstanding piutang negara	-	3,09%	77%
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	95,54	97,75	95.69
		Persentase realisasi pokok lelang	-	79,18%	181,11%
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,75	4,61	4,68
4	Penerapan Tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	101,89%	101,44%
		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	-	166,67%	125,93%
		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	-	1,66%	0,40%
5	Penerapan Tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	-	151,54%	122,22%
		Persentase produktifitas lelang	47,18%	52,71%	54,46%
		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100%	100%	100%

		Deviasi data PNB Fungsional DJKN	-	-	0%
6	Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91,73	92,24	94,79
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	81%	100%	94,59%
8	SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	115,71%	116,47%
9	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	Nilai reviu pengelolaan kinerja	94,13	92,70	94,26
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	92,07	94,78
10	Pengelolaan Keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,37%	97,90%	95,70%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			109,94%	104,85%	109,57%